

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Bantul



Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 1100 12'34'' sampai 1100 31' 08'' Bujur Timur dan antara 70 44' 04'' sampai 80 00'27'' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 km² (15,90% dari Luas wilayah Propinsi DIY). Secara administratif Kabupaten Bantul terbagi dalam 17 Kecamatan 75 Desa, 933 Dusun.

Adapun kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul,

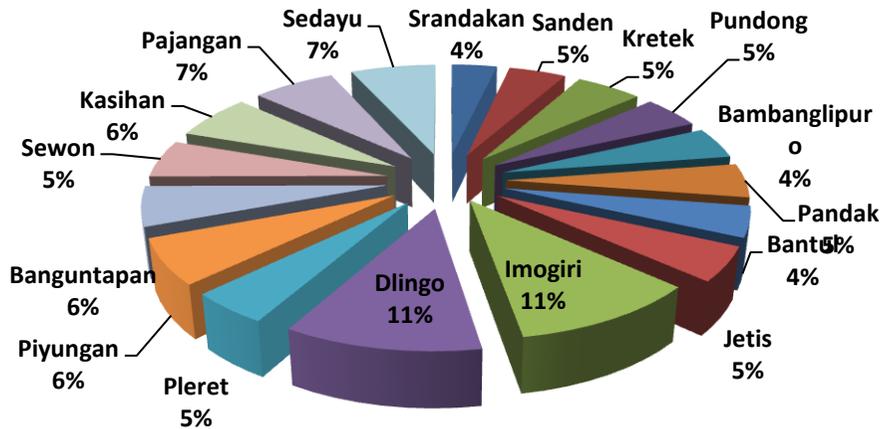
Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu. Untuk masing-masing luas kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 4.1. Tabel Luas Wilayah dan Banyaknya Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2015

NO	KEC	Luas Area (Ha)	Presentase luas (%)	Banyaknya desa
1	Srandakan	1.832	3,61	2
2	Sanden	2.316	4,57	4
3	Kretek	2.677	5,28	5
4	Pundong	2.368	4,67	3
5	Bambanglipuro	2.270	4,48	3
6	Pandak	2.430	4,79	4
7	Bantul	2.195	4,33	5
8	Jetis	2.447	4,83	4
9	Imogiri	5.449	10,75	8
10	Dlingo	5.587	11,02	6
11	Pleret	2.297	4,53	5
12	Piyungan	3.254	6,42	3
13	Banguntapan	2.848	5,62	8
14	Sewon	2.716	5,36	4
15	Kasihan	3.238	6,39	4
16	Pajangan	3.325	6,56	3
17	Sedayu	3.436	6,78	4

Sumber : Kabupaten Bantul dalam angka tahun 2016

Gambar 4.2. Presentase Luas Wilayah Kabupaten Bantul Menurut Kecamatan



4.2. Gambaran umum Pemilukada 2015

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul dilaksanakan selama 12 bulan tahapan, mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan. Adapun tahapan tersebut dibagi kedalam dua kelompok besar yakni, tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Tahap persiapan terdiri dari Penyusunan Program dan Anggaran, Rekrutment Badan Ad Hoc, Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Pemutakhiran Data Pemilih, dan Sosialisasi.

Sedangkan untuk tahap penyelenggaraan terdiri dari Pencilonan, Kampanye, Pelaporan dan Audit Dana Kampanye,

Penyiapan Logistik, Pemungutan suara dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan Pasangan Calon Terpilih, hingga Pengusulan Pengukuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

KPU Kabupaten Bantul sebagai pelaksana tetap berusaha memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan berintegritas dalam setiap tahapan pemilu, dan berusaha sebaik mungkin melewati dinamika dan tantangan yang dihadapi saat pemilukada berlangsung. Dinamika regulasi baru dalam penyelenggaraan pemilukada serentak pertama kali ini mewarnai setiap tahapan pemilihan. Mekanisme baru ini menuntut profesionalitas, netralitas, independensi, dan kapasitas tinggi dari penyelenggara.

Tantangan awal yang dihadapi ialah berkaitan dengan proses perencanaan anggaran. Ketersediaan dana pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pihak penyedia dana, dinamika regulasi keuangan yang berkembang, serta tuntutan pemenuhan regulasi di setiap tahapan membuahakan situasi dialogis yang cukup dinamis. Perubahan regulasi terkait rekrutment badan ad

hoc (PPK, PPS, KPPS) menjadi tantangan kedua, dimana peraturan yang baru membatasi masa jabatan badan ad hoc hanya dua periode.

Kendala selanjutnya ditemui saat tahapan pemutakhiran data, dimana ada beberapa warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar kedalam daftar pemilih. Begitu juga sebaliknya ada warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namun namanya masih tercantum dalam daftar pemilih. Kondisi ini pada akhirnya mampu diselesaikan sesuai dengan mandat yang ada, dengan mengkoordinir warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan dan mencoret nama yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Proses pemutakhiran data pemilih mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2014, yang diturunkan kedalam PKPU nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun syarat sebagai pemilih di dasarkan atas domisili di daerah

pemilihan yang dibuktikan dengan identitas kependudukan yang sah

Proses pemutakhiran data dan daftar pemilih dimulai dari penerimaan DP4 dari kementerian dalam negeri, selanjutnya disinkronkan dengan data pemilu terakhir sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP. Hasil coklit tersebut diolah menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), selanjutnya diumumkan ke warga untuk diberi masukan dan tambahan data. Masukan dari warga tersebut diolah menjadi DPS hasil pemutakhiran, (DPSHP) dan selanjutnya diolah dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar Pemilih Tetap pada pelaksanaan pilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel. 4.2. Tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Kabupaten Bantul tahun 2015**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bambanglipuro	2	5	8	7	15
2	Banguntapan	8	20	12	22	34
3	Bantul	4	31	24	31	55
4	Dlingo	6	17	24	25	49
5	Imogiri	5	12	14	10	24
6	Jetis	4	44	28	56	84
7	Kasihan	4	72	88	109	197
8	Kretek	3	10	5	12	17
9	Pajangan	1	2	2	1	3
10	Pandak	3	17	22	21	43
11	Piyungan	3	4	1	5	6
12	Pleret	2	6	14	22	36
13	Pundong	3	41	48	48	96
14	Sanden	3	32	27	51	78
15	Sedayu	3	8	9	4	13
16	Sewon	4	33	47	43	90
17	Srandakan	2	5	3	3	6
	TOTAL	60	359	376	470	846

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2015

Setelah penentuan DPT diumumkan kepada masyarakat, untuk warga yang belum terdaftar dalam DPT masih dapat diakomodir dalam Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) yang dibuka seminggu setelah DPT diumumkan. KPU Kabupaten Bantul juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara kebetulan tidak bisa datang ke TPS untuk memberikan

suaranya pada hari H yakni tanggal 9 desember 2015 karena hal-hal tertentu. Bentuk pelayanan tersebut dengan membentuk Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) untuk pemilih khusus yang ada di Rutan Bantul, Rutan polsek se-Bantul dan 14 rumah sakit rawat inap. Adapun tempat/lokasi yang digunakan KPU dalam memberikan suara oleh DPPh akan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4.3. Daftar Rutan dan RS yang dilayani

NO	RUMAH SAKIT	RUTAN
1	RS Elisabeth Bambanglipuro	Polsek Bambanglipuro
2	Rumah Sakit Hardjo Lukito Banguntapan	Polsek Banguntapan
3	Rumah Sakit Rajawali Sitra Potorono Banguntapan	Polres Bantul
4	RS PKU Muhammadiyah Bantul	Polsek Bantul
5	RSUD Panembahan Senopati Bantul	Polsek Sewon
6	RS Respira Bantul	Polsek Kretek
7	RSKIA Ummi Hasanah Bantul	LP Pajangan
8	RS Permata Husada Pleret	Polsek Pajangan
9	RSU Patmasuri Sewon	
10	RSKB Ring Road Selatan, Sewon	
11	Balai Pengobatan PKU Srandakan	
12	RS Nurhidayah Jetis	
13	RS Rachma Husada Jetis	
14	RS Kalimasada Kasihan	

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2015

Pelayanan maksimal yang sudah diberikan oleh KPU Kabupaten Bantul pada pemilu pada tahun 2015, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan nilai demokratis dan meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bantul dalam pemberian suara, serta bertujuan agar dapat mengurangi tingkat pemilih golongan Putih (golput)

4.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

4.3.1. Sejarah Partai Gerindra

Bermula dari keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan yang terjadi akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Rancangan awal pembentukan partai ini pertama kali di kemukakan oleh Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo dalam perjalanan menuju bandara, tepatnya pada November tahun 2007. Mereka berpendapat bahwa demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibat yang ditimbulkan apabila kondisi tersebut terus berjalan ialah rakyat hanya dijadikan



alat, bahkan siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah menjadi korban.

**Gambar 4.3. Logo
Partai Gerindra**

Apabila keadaan seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, negara kedepannya hanya akan diperintah oleh para mafia besar, akhirnya Hashim setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat.

Pembentukan partai terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung

garuda digagas oleh Prabowo Subianto. Partai Gerindra dideklarasikan pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Maka jadilah Partai Gerindra yang kita kenal sekarang. Perpaduan antara nama dan lambang yang tepat, sebab keduanya menggambarkan semangat kemandirian, keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung garuda yang menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti, Gerindra mendapatkan tempat di hati masyarakat.

4.3.2. Visi dan Misi partai Gerindra

a. Visi

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

b. Misi :

- Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.

- Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
- Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

4.4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

4.4.1. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pembentukan PKB diawali dengan adanya usulan dari warga NU untuk mendirikan sebuah partai politik pasca lengsernya Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa ini menandai lahirnya era reformasi di Indonesia. Melihat hal ini warga NU mengusulkan banyak nama untuk partai politik yang akan dibentuk oleh PBNU. Hal ini harus difikirkan secara hati-hati, dimana berdasarkan hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Pendapat tersebut belum memuaskan kehendak warga NU, banyak kalangan NU yang tetap menginginkan pembentukan parpol tersebut.

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik

partai. Pada akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlusunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada **29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998**. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah: Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Gambar 4.4. Logo Partai PKB



Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah

dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**.

4.4.2. Visi dan Misi PKB

a. Visi

- Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

b. Misi

- **Bidang Ekonomi:** menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;

- **Bidang Hukum:** berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- **Bidang Sosial Budaya:** berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- **Bidang Pendidikan:** berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- **Bidang Pertahanan:** membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik

yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

4.5. PARTAI DEMOKRAT

4.5.1. Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY) yang terilhami oleh kekalahan terhormat beliau pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dan hasil pooling publik pada pemilu presiden, popularitas yang dimiliki oleh SBY berhasil membuat beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan cara agar sosok SBY bisa menjadi Presiden RI untuk masa mendatang, bukan hanya sebagai Wakil Presiden.

Agar cita-cita tersebut bisa terlaksana dengan baik, jalan satu-satunya adalah dengan mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai dilaksanakan oleh Tim Krisna Bambu Apus, dan selanjutnya untuk bagian teknis administrasi diselesaikan

oleh Tim Vence Rumangkang. Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya. Akan tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja pendirinya, namun dilengkapi menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada kesinambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yang dimana SBY lahir pada tanggal 9 bulan 9.

Pada tanggal 9 September 2001 yang bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI Jakarta Selatan, tepat dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusan dari partai Demokrat ini mulai disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam,

sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen.

Gambar 4.5. Logo Partai Demokrat



Setelah diadakan penelitian, maka Vence Rumangkang meminta Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum, dan Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.

Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001. Kemudian departemen

Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

4.5.2. Visi dan Misi Partai Demokrat

a. visi

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

b. Misi

- Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

- Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

- Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

4.6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

4.6.1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada 20 Juli 1998 di Jakarta, tepatnya saat konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, PKS awalnya berdiri dengan nama Partai Keadilan (PK), dimana saat itu presiden Partai Keadilan adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada tanggal 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran bergabung dalam kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) pada kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan Partai Keadilan menunjuk Nurmahmudi Isma'il yang saat itu

menjabat sebagai persiden partai untuk menempati posisi sebagai calon menteri.

Keputusan tersebut ia terima, dan akhirnya Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden partai dan kemudian digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada tanggal 3 Agustus 2000, kedelapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta agar Piagam Jakarta dimasukkan kedalam Amandemen UUD 1945.

Dampak yang dihasilkan dari UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) yang hanya sebesar dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat turut serta dalam Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) akhirnya sudah berhasil menyelesaikan seluruh proses verifikasi di Departemen Kehakiman dan

HAM (Depkehham), pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi), dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

Satu hari setelah penyelesaian seluruh proses verifikasi, PK memutuskan untuk bergabung dengan PKS. Dengan adanya penggabungan seperti ini, seluruh hak yang dimiliki oleh PK secara otomatis akan menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan adanya penggabungan kedua partai ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Gambar 4.6. Logo Partai Keadilan Sejahtera



Setelah Pemilu 2004 berlangsung, Hidayat Nur Wahid yang sedang menjabat sebagai presiden PKS berhasil terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009, dan ia mengambil sikap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Tepat pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26-29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PKS periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid sebelumnya, disaat Tifatul Sembiring masih menjabat jadi presiden partai ia dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono yakni Presiden Indonesia ke 6 untuk menjabat kursi pemerintahan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Atas dasar keputusan tersebut, estafet kepemimpinan di PKS dilimpahkan ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai penanggung jawab sementara Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 – 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq yang awalnya menjabat sebagai penanggung jawab sementara presiden, berhasil terpilih

dan diamanatkan menjadi Presiden PKS periode 2010-2015.

4.6.2. Visi Misi PKS

a. Visi

Adapun visi umum yang diusung oleh PKS ialah sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.

b. Misi

- Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
- Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.

- Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
- Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.